KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggota DPR ke Luar Negeri
Tanggal : Senin, 03 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 15

Anggota DPR ke Luar Negeri

Imbauan Presiden Joko Widodo agar pejabat negara tidak ke luar negeri untuk mencegah penularan Omicron diabaikan. Begitu pula keputusan Badan Musyawarah DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua dan sejumlah anggota Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara DPR bersama pejabat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dikabarkan berkunjung ke Kazakhstan untuk studi banding pemindahan ibu kota negara. Padahal, jauh-jauh hari Presiden Joko Widodo dan keputusan DPR meminta pejabat negara tidak ke luar negeri guna mencegah penularan Covid-19 varian Omicron.

Kabar lawatan anggota DPR dan pejabat kementerian ke Kazakhstan itu pertama kali tersiar melalui utusan Duta Besar RI untuk Kazakhstan Fadjroel Rachman di akun Instagramnya, Minggu (2/1/2022). Ia menyebutkan, Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga beserta rombongan akan meninjau Nur Sultan, ibu kota Kazakhstan setelah pindah dari kawasan Almaty sejak 1997.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Minggu, Ahmad Doli dari Fraksi Partai Golkar telah berangkat pada Sabtu (1/1) bersama dua anggota pansus, yaitu Yanuar Prihatin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Achmad Baidowi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Mereka berangkat bersama tim dari Kementerian PPN/Bappenas, dan dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada Kamis (6/1).

Saat ditanya terkait imbauan agar pejabat tidak ke luar negeri, Indra menyebut perjalanan ke luar negeri yang diminta tidak dilakukan adalah perjalanan yang tak berkaitan dengan kedinasan, seperti perjalanan pribadi. Selain itu, perjalanan ke Kazakhstan memiliki urgensi khusus, yakni RUU IKN ditargetkan pemerintah dan DPR tuntas pada 2022.

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono membenarkan tim Kementerian PPN/Bappenas yang dipimpin Himawan sedang ke Kazakhstan. "Kazakhstan pernah memindah ibu kota dan relatif berhasil, jadi kita belajar dari sana," ucapnya.

Belum jadi jalan

Sebaliknya, menurut Doli, pansus belum berangkat ke Kazakhstan. Jadi atau tidaknya keberangkatan masih dikaji pansus. "Ada beberapa kali rencana kunjungan memang, tetapi kami belum jadi jalan. Sekarang, kita lihat situasinya dulu, masih timbang-timbang," ujarnya.

Pertengahan Desember lalu atau setelah Omicron terdeteksi masuk ke Tanah Air, Presiden meminta pejabat negara tidak ke luar negeri. Sebelum itu, Ketua DPR Puan Maharani pernah menyampaikan keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus DPR) pada 6 Desember 2021 yang menunda seluruh rencana perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri guna mencegah penularan Omicron.

Keteladanan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai anggota DPR dan pejabat kementerian yang ke Kazakhstan gagal menunjukkan keteladanan bagi masyarakat. Padahal, sebagai pemimpin, pejabat negara, dan wakil rakyat, mereka seharusnya menjadi contoh dalam upaya negeri ini menghadapi pandemi dan ancaman terbaru dari Omicron.

Menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center Ahmad Hanafi, studi banding ke luar negeri seharusnya dapat diganti dengan model daring atau riset kolaboratif antara tim ahli DPR dan peneliti dari kampus di negara yang dituju. Dengan demikian, bisa terhindar dari Omicron dan lebih hemat.

(DEA)

Kompas, 3/1/22 h. 15